

**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Koperasi
(Studi Kasus Pada Koperasi Mahasiswa Universitas X)****Suci Rahayu¹, Sarifatul Hoiriyah², Kana Kanari³, Devi Aulia Rahmawati⁴, Saprina****Aulia⁵, Abdul Basit⁶, Gista Rismayani⁷****Universitas Perjuangan Tasikmalaya^{1,2,3,4,5,6,7}**[¹, sarifatulhoiriyah97@gmail.com²,](mailto:sucirahayu5678@gmail.com)[³, deviauliar8@gmail.com⁴, inaa.inaa472@gmail.com⁵,](mailto:kanakanari333@gmail.com)[⁶, gistarismayani@unper.ac.id⁷](mailto:basittasik195@gmail.com)

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2026

Disetujui Juli 2026

Diterbitkan Agustus 2026

Keywords: *Internal control system, student cooperative, COSO, agency theory, cooperative governance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the internal control system at the Student Cooperative (KOPMA) of X University using the COSO framework, grounded in Agency Theory proposed by Jensen & Meckling (1976) underpins this study by explaining the principal-agent relationship between cooperative members and management, where information asymmetry necessitates robust internal controls to limit opportunistic behavior. The research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with two key informants Treasurer and Public Relations and direct observation on May 24, 2026. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model. The results indicate that overall, the internal control system of Kopma has been implemented reasonably well. The control environment is established with a clear organizational structure, written SOPs, and a competency-based recruitment mechanism. Risk assessment is conducted through weekly reconciliation and biweekly evaluation meetings. Control activities are implemented through tiered authorization and transaction evidence verification, although the segregation of authorization and recording functions has not been fully optimized. Information and communication operate through weekly and monthly reporting, yet digitalization remains limited. Monitoring is carried out at multiple levels, ranging from daily to annual through the Annual Members' Meeting (RAT). This study concludes that Kopma X has implemented most internal control components according to the COSO framework, with the need for improvement in the segregation of functions and digitalization of reporting systems.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia karena perannya yang strategis dalam menggerakkan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127.846 unit yang terdiri atas koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Di lingkungan perguruan tinggi, peran tersebut diwujudkan melalui Koperasi Mahasiswa (Kopma) yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran

kewirausahaan dan pengelolaan keuangan secara langsung bagi mahasiswa (Novitaningrum Diah, 2024). Pengurus Kopma dituntut mampu mengelola simpanan anggota, transaksi usaha, dan administrasi keuangan secara tertib agar fungsi koperasi sebagai laboratorium ekonomi kampus dapat berjalan secara optimal (Rato et al., 2023).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi, baik koperasi umum maupun koperasi mahasiswa, masih dihadapkan pada berbagai persoalan tata kelola yang serius. Kasus gagal bayar yang menimpa delapan koperasi simpan pinjam di Indonesia dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam tubuh koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Pada lingkup yang lebih kecil, pada penelitian I Gusti Ayu Anom Pradnyawati et al. (2019) menemukan adanya rangkap jabatan serta pencatatan transaksi yang tidak sesuai prosedur akuntansi pada koperasi pegawai negeri yang diteliti. Temuan tersebut diperkuat oleh Amanah et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang lemah turut menjadi penyebab tingginya kredit bermasalah pada lembaga keuangan mikro. Secara spesifik pada konteks koperasi mahasiswa, (Novitaningrum Diah, 2024) menemukan bahwa pencatatan keuangan kopma masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi antarunit, sehingga bersiko menimbulkan kesalahan maupun penyalahgunaan dana oleh pengurus yang notabene berstatus mahasiswa dengan masa jabatan terbatas.

Penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian mengenai sistem pengendalian internal koperasi sebagian besar masih terpusat pada objek koperasi simpan pinjam, koperasi pegawai, maupun koperasi serba usaha (Nona Dince et al., 2022). Fitria (2024) dan Budiningrum et al. (2023) juga lebih banyak menyoroti peran audit internal dan sistem informasi akuntansi pada koperasi yang bersifat komersial, sementara koperasi mahasiswa yang memiliki karakteristik organisasi berbeda dikelola oleh mahasiswa dengan masa kepengurusan singkat dan tingkat rotasi pengurus yang tinggi belum banyak menjadi objek kajian secara mendalam. Penelitian mengenai analisis sistem pengendalian internal pada koperasi mahasiswa, khususnya pada konteks Kota Tasikmalaya, juga belum ditemukan dalam basis data jurnal nasional, sehingga teridentifikasi kesenjangan penelitian baik dari sisi objek kajian maupun konteks geografis yang perlu diisi melalui penelitian ini.

Kesenjangan tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, baik dari sisi ilmiah maupun praktis. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas penerapan teori pengendalian internal pada konteks organisasi nonprofit berbasis mahasiswa yang memiliki karakteristik tata kelola berbeda dari koperasi komersial pada umumnya. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengurus dan pembina Kopma dalam memperkuat mekanisme pengawasan, pemisahan tugas, dan pencatatan keuangan agar risiko kesalahan maupun kecurangan dapat diminimalisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis komponen pengendalian internal dengan karakteristik unik pengelolaan koperasi mahasiswa di Kota Tasikmalaya, suatu konteks yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur akuntansi koperasi nasional. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini berlandaskan pada Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976b), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal (anggota koperasi) dan agent (pengurus) yang diberi kewenangan mengelola sumber daya organisasi. Salah satu tantangan utama dalam hubungan ini adalah asymmetric information, yaitu kondisi di mana pengurus memiliki akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan anggota, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik berupa moral hazard maupun adverse selection (Eisenhardt, 1989). Dalam konteks ini, pengendalian internal yang kokoh menjadi instrumen utama untuk menekan asimetri informasi dan menjamin

akuntabilitas pengurus kepada anggota. Kerangka Committee of Sponsoring Organizations (Nona Dince et al., 2022) digunakan sebagai alat analisis karena menyediakan lima komponen pengendalian internal yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang secara bersama-sama memastikan agen bertindak secara transparan dan dapat diverifikasi oleh prinsipal (Beasley et al., 2000).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai sistem pengendalian intern pada Koperasi Mahasiswa (Kopma) Universitas X. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dalam setting nyata (Yin, 2018).

Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Mahasiswa Universitas X yang berlokasi di dekat Gedung FKIP, Universitas X, Kota Tasikmalaya. Subjek penelitian terdiri dari dua Saudari yang dipilih secara purposive, yaitu Bendahara dan bagian Humas aktif Kopma Universitas X. Pemilihan Saudari didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua pihak tersebut memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan operasional serta sistem pengendalian intern koperasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 24 Mei 2026 melalui dua teknik, yaitu: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) kepada Pengurus Kopma untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan pengendalian intern secara langsung; dan (2) observasi langsung terhadap aktivitas dan kondisi operasional Kopma guna memperoleh gambaran nyata di lapangan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil wawancara dan observasi yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi terhadap temuan berdasarkan komponen-komponen pengendalian intern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap dua orang narasumber anggota aktif dari Koperasi Mahasiswa di Universitas X yang dipilih berdasarkan kompetensi dan relevansi bidangnya dalam penelitian. Demi menjaga etika anonimasi, identitas informan disamarkan menggunakan inisial sebagai berikut:

Informan F : Anggota aktif sebagai Hubungan Masyarakat (Humas)

Informan S : Anggota aktif sebagai Bendahara

Berdasarkan data dari kedua informan tersebut, hasil dan temuan dianalisis secara tematik berdasarkan lima dimensi pengendalian internal menurut kerangka COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berikut ini :

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari seluruh komponen pengendalian internal karena mencerminkan sikap, kesadaran dan tindakan manajemen terhadap pentingnya pengendalian dalam organisasi (COSO, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KOPMA X telah membangun lingkungan pengendalian yang cukup memadai. Kondisi ini tercermin dari adanya struktur organisasi yang jelas, kode etik tertulis, serta mekanisme rekrutmen pengurus yang transparan dan berbasis kompetensi. Struktur organisasi KOPMA tersusun secara berjenjang dimulai dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai lembaga tertinggi diikuti oleh pembina, ketua umum, dan pengurus yang berkedudukan sejajar, hingga manajer dan staf pada tingkat operasional, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Struktur paling tinggi itu ada RAT (Rapat Anggota Tahunan). Barulah ke bawahnya sejajar itu ada pembina, ada ketua umum, sama pengawas. Jadi, nah barulah kalau pengawas kan beda, ada garis koordinasi sama garis perintah. Kalau misalnya dari ketum ke pembina itu koordinasi. Nah barulah dari ketum ke bawah itu ada garis perintah. Untuk di bidang organisasi itu ada tiga, bidang administrasi dan umum, ada bidang pengembangan sumber daya anggota, dan ada bidang humas. Terus ada bidang keuangan juga, terus ada bidang usaha. Nah bidang usaha ini tuh yang empat ini ada, yang pertama tuh sebagai kepalanya tuh ada manajer umum. Nah barulah manajer umum tuh membawahi empat bidang usaha. Ada gudang, kantin, kismawa (Kios mahasiswa), dan kopmacenter " (Informan S).

Dalam aspek rekrutmen calon pengurus diwajibkan menandatangani surat pernyataan dan surat perjanjian bermaterai sebagai bentuk komitmen terhadap organisasi. Kebijakan larangan rangkap jabatan juga diterapkan disertai prioritas bagi pengurus yang telah menjalani masa magang di KOPMA, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Syarat khususnya tuh yang pertama, enggak boleh rangkap jabatan. Tapi biasanya kita tuh memprioritaskan orang-orang yang udah magang di KOPMA. Dan harus menandatangani surat pernyataan dan surat perjanjian dengan tanda tangan basah. Tujuannya agar pengurus fokus ke KOPMA karena mengelola KOPMA itu bukan seperti mengelola ORMAWA tetapi benar-benar terjun ke dunia bisnis langsung karena ada tunjangan dan insentif " (Informan S).

Aspek integritas dan nilai etika juga telah terlembagakan melalui kode etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pengurus, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Ada, pasti ada (kode etik). Karena kita disini juga udah berbadan hukum" (Informan S).

"Tertulis, ada kontrolnya. Jadi setiap staf juga memiliki SOP-nya masing-masing. Jadi bisa ngontrol. Kalau SOP secara keseluruhan, terus terperinci tiap pengurus harus ngapain aja. Harus kayak gimana, tanggung jawab sama haknya dan kewajibannya apa saja" (Informan F).

2. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi (COSO, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa KOPMA X telah melaksanakan proses penilaian risiko secara aktif,

khususnya pada aspek keuangan. Risiko utama yang diidentifikasi mencakup risiko kas, piutang, dan persediaan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Kalau risiko kas sama risiko piutang itu di urusnya sama bagian keuangan, khususnya staff keuangan yang memiliki tugas untuk mengidentifikasi risikonya" (Informan S).

Risiko kas dikelola melalui pemantauan rutin oleh asisten manajer keuangan yang mengawasi seluruh arus kas lintas bidang usaha. Risiko piutang dikendalikan dengan penetapan batas piutang karyawan maksimal Rp200.000 per orang serta batas waktu pelunasan paling lambat bulan November sebelum pelaksanaan RAT, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Kita menargetkan maksimal untuk satu karyawan itu Rp200.000. Jadi tiap minggu itu kita mantau si piutangnya udah nyampe berapa, kalau udah Rp200.000 udah stop" (Informan S).

Sementara itu, risiko persediaan dipantau melalui audit persediaan bulanan (stock opname) dengan target gross profit margin sebesar 23%. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh (Informan S)

"Kalau persediaan itu kita tiap bulan menghadapi stock opname atau audit persediaan, untuk persediaan kita normalnya di gross profit margin-nya itu 23%" (Informan S).

Analisis risiko dilakukan setiap dua minggu sekali melalui pertemuan daring (G-Meet) yang melibatkan manajer bidang, asisten manajer, manajer keuangan, manajer umum, serta pengawas keuangan. Forum ini membahas capaian target, strategi pemenuhan omzet, dan dampak apabila target tidak tercapai, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Per 2 minggu kita melakukan G-Meet atau offline, membahas keadaan keuangan pas sekarang kayak gimana, resiko-resikonya bakalan kayak gimana" (Informan S).

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan prosedur yang memastikan arahan manajemen dilaksanakan secara efektif untuk mengurangi risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi (COSO, 2013). Aktivitas pengendalian di KOPMA X mencakup beberapa mekanisme yang dirancang untuk memastikan kebijakan terlaksana sesuai prosedur. Dalam hal otorisasi transaksi, setiap pengeluaran dana program kerja wajib mendapat persetujuan dari ketua umum dan masukan dari pengawas keuangan. Untuk transaksi operasional rutin, otorisasi berada pada manajer bidang dan asisten manajer keuangan. Hak akses perbankan hanya diberikan kepada ketua umum dan manajer keuangan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan yaitu ketua umum. Nanti dari manajer keuangan dikirimkan kepada ketua umum dan pengawas keuangan. Nanti ketua umum akan meng-acc dan pengawas memberikan saran dan masukan apakah layak di-acc atau tidak" (Informan S).

Pemeriksaan bukti transaksi dilakukan setiap minggu dengan memverifikasi kelengkapan nota, mencakup tanggal, kuantitas, nama barang, harga, tanda tangan penerima, dan cap basah dari toko. Nota yang tidak memenuhi syarat tidak akan diterima sebagai bukti transaksi, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Setiap minggu itu di cek apakah notanya sudah sesuai, misalnya dari tanggal, nama tokonya, nama barangnya jelas atau tidak, harganya. Terus harus dibuktikan dengan dua tanda tangan penerima dari tokonya disertai dengan nama jelas" (Informan S).

Meskipun demikian, pemisahan fungsi otorisasi dan pencatatan keuangan belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini diakui oleh narasumber, namun diimbangi dengan penyimpanan dana yang hampir 90% melalui perbankan sehingga setiap transaksi tercatat secara otomatis. Dan pengarsipan bukti transaksi dilakukan berdasarkan tanggal, tanpa nomor urut, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Belum ada pemisahan fungsi. Tapi kita tuh sekarang uangnya hampir 90% itu disimpan di perbankan. Jadi, itu kan ter-record ya, kalau ada pengeluaran itu ter-record" (Informan 2).

"Tidak ada nomor urut tapi sesuai tanggal" (Informan S).

4. Informasi dan Komunikasi (*Informant and Communication*)

Informasi dan komunikasi menekankan pentingnya penyediaan informasi yang relevan dan tepat waktu agar seluruh pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara efektif (COSO, 2013) . Sistem informasi dan komunikasi keuangan di KOPMA X berjalan secara berjenjang dan terdokumentasi, meskipun belum sepenuhnya berbasis sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Pelaporan keuangan dilakukan secara mingguan oleh staf keuangan masing-masing bidang usaha menggunakan *Google Spreadsheet*, kemudian dikonsolidasikan oleh asisten manajer keuangan menggunakan *Microsoft Excel* karena efisiensi biaya, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Kalau buat sekarang itu masih pakai Excel. Kenapa? Karena kalau pakai aplikasi software kayak gitu tuh lumayan ya biaya pertahunnya" (Informan S).

Laporan mingguan dikirimkan dari staf keuangan setiap Sabtu malam kepada manajer bidang, asisten manajer keuangan, manajer keuangan, dan pengawas keuangan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Laporan perminggunya itu dari staf keuangan dikirim ke manajer bidangnya, asisten manajer keuangan, manajer keuangan, dan pengawas keuangan. Itu dikirimnya hari Sabtu, Sabtu malam" (Informan S).

Sedangkan laporan keuangan bulanan disampaikan dalam rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh pengurus sehingga kondisi keuangan diketahui secara menyeluruh. sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Semua pengurus mengetahui kondisi keuangan kayak gimana. Enggak Cuma bidangnya saja yang mengetahui, tapi seluruh pengurus juga mengetahui" (Informan S).

Transparansi kepada anggota dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban semester dan RAT, serta melalui laman I-SHU yang saat ini masih belum maksimal karena websitenya masih dalam proses pemeliharaan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Kita sekarang digitalisasinya belum maksimal. Jadi kalau ada yang mengingatkan baru kita transparansikan, tetapi semuanya kita transparansikan di laporan pertanggungjawaban semester dan RAT saja. Sebelumnya bisa di cek di

website I-SHU, itu biasanya dilampirkan laporan keuangan dari tiap bidang, dari asisten manajer. Tapi karena sekarang masih proses pemeliharaan website nya, jadi kita belum memaksimalkan disana" (Informan S).

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan kerangka COSO yang berfungsi untuk menilai kualitas pengendalian internal secara berkala, baik melalui evaluasi yang berkesinambungan maupun evaluasi tersendiri (COSO, 2013). Berdasarkan Agency Theory, pemantauan yang berjalan dengan baik merupakan biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang sangat penting guna memastikan bahwa agen senantiasa menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976b) dan (Holmstrom, 1979).

Koperasi Mahasiswa X menerapkan sistem pemantauan bertingkat yang dilakukan dalam berbagai rentang waktu. Pemantauan harian dilaksanakan pada tataran operasional di setiap unit usaha, pemantauan mingguan dilaksanakan oleh pengawas keuangan berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan setiap Sabtu malam, pemantauan dua mingguan dilakukan melalui forum *G-Meet* atau pertemuan secara langsung, pemantauan bulanan berlangsung dalam rapat bulanan yang membahas evaluasi kinerja dan penyusunan rencana, serta pemantauan tahunan melalui forum RAT (Rapat Anggota Tahunan), sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Pengawasan itu minimal banget itu satu bulan. Satu bulan sekali. Tapi itu harusnya per hari atau per tiap minggu juga harus ada pengawasan gitu kan" (Informan S).

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya kesadaran dari pihak pengurus terhadap keterbatasan dalam sistem pemantauan yang sedang berjalan, dan hal ini menunjukkan sikap positif yang mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pemantauan juga melibatkan tiga kategori pengawas yang memiliki peran berbeda, yaitu pengawas keuangan yang bertugas mengawasi aspek finansial, pengawas organisasi yang terlibat dalam setiap kegiatan kelembagaan, serta pengawas bidang usaha yang dilibatkan dalam kegiatan komersial seperti bazar dan promosi. Adanya pembagian peran pengawasan ini menjadikan setiap bagian operasional KOPMA X mendapat perhatian yang memadai sesuai dengan bidangnya masing-masing. KOPMA X juga telah menyusun prosedur yang sistematis dan bertahap dalam menangani pelanggaran, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan

"Kalau ada pelanggaran di pengurusan, nanti bisa disampaikan ke Ketua Umum dulu... kalau kesalahannya total bisa SP1 dulu, terus SP2, dan terakhir SP3, dan dikeluarkan" (Informan S).

Pemberian sanksi secara bertahap ini merupakan bentuk mekanisme pendisiplinan yang dapat mencegah perilaku oportunistik dari agen, dan pada saat yang sama memberikan peluang bagi perbaikan perilaku sebelum tindakan yang lebih tegas diterapkan.

Evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian internal dilaksanakan dalam rapat bulanan, yang juga mencakup pembahasan mengenai pencapaian periode sebelumnya serta rencana kerja ke depan, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Rapat bulanan itu mencakup kayak evaluasi bulan sebelumnya dan apa yang akan dilakukan" (Informan S).

Setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat dicatat dalam notulensi, dan apabila ditemukan kelemahan yang memerlukan tindakan lanjut, maka hal tersebut dikonsultasikan dengan demisioner serta pembina. sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan :

"Kalau tindak lanjutnya, ada gitu ya. Paling kalau ada kelemahan-kelemahan itu kita nggak mengeksekusinya langsung, tapi kita berkoordinasi, berkonsultasi dengan demisioner sebelumnya, dengan pembina" (Informan S).

Langkah konsultasi dengan demisioner dan pembina sebelum menjalankan tindak lanjut merupakan bentuk pengendalian yang efisien karena memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan kelembagaan yang dimiliki oleh mereka yang telah lebih dahulu terlibat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di Koperasi Mahasiswa Universitas X, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kopma secara keseluruhan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

Ditinjau dari lima komponen pengendalian intern berdasarkan kerangka COSO, pertama, lingkungan pengendalian pada Kopma telah terbentuk dengan baik, ditandai dengan adanya struktur organisasi yang jelas, SOP tertulis untuk setiap pengurus, mekanisme seleksi pengurus yang ketat, serta kewajiban penandatanganan surat pernyataan dan perjanjian sebagai bentuk komitmen. Kedua, penilaian risiko telah dilaksanakan secara aktif melalui rekonsiliasi laporan keuangan mingguan, pemantauan *gross profit margin* persediaan sebesar 23%, serta rapat evaluasi dua minggu sekali secara daring maupun luring untuk membahas risiko keuangan dan pencapaian target. Ketiga, aktivitas pengendalian tercermin dari penerapan otorisasi berjenjang dalam setiap transaksi keuangan, pemeriksaan nota dan bukti transaksi secara mingguan, serta pengelolaan kas yang hampir 90% disimpan di perbankan untuk meminimalkan risiko. Namun, pemisahan fungsi antara otorisasi dan pencatatan keuangan belum sepenuhnya diterapkan. Keempat, informasi dan komunikasi telah berjalan cukup baik melalui pengiriman laporan keuangan mingguan, rapat bulanan yang melibatkan seluruh pengurus, serta pemanfaatan *spreadsheet* dan Google Drive sebagai media pengelolaan data, meskipun digitalisasi pelaporan kepada anggota masih belum optimal. Kelima, pemantauan dilakukan secara berkelanjutan oleh pengawas internal yang terbagi per bidang, dengan mekanisme teguran, surat peringatan, hingga pemberhentian bagi pengurus yang melakukan pelanggaran.

Dengan demikian, Kopma Universitas X telah menerapkan sebagian besar komponen pengendalian intern sesuai kerangka COSO, dan dapat dijadikan referensi praktik pengelolaan koperasi mahasiswa yang baik, dengan catatan perlunya perbaikan pada aspek pemisahan fungsi dan digitalisasi sistem pelaporan kepada anggota.

BIBLIOGRAFI

- Amanah, A., Asturi, P., & Nurdiwaty, D. (2022). Sistem Pengendalian Internal Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah Studi PT. Pegadaian (Persero) UPC Pare. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(1), 138–143.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. *Accounting*

Horizons, 14(4), 441–454.

- Budiningrum, wening, E., & Subiyantoro, A. (2023). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KOPERASI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PENGELOLAAN KOPERASI. *Jurnal Economina*, 2(3).
- COSO. (2013). Internal control integrated framework: Executive summary. *Coso, May*, 1–20.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fitria, A. (2024). Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(1), 124–134.
- Holmstrom, B. (1979). Moral Hazard and Observability. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.2307/3003320>
- I Gusti Ayu Anom Pradnyawati, I Wayan Suwendra, & I Nyoman Sujana. (2019). Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Koperasi Pegawai Negeri Setya Graha Di Kecamatan Mendoyo Tahun 2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* , Volume 11(1), 249–259.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976a). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976b). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). 8 Koperasi Bermasalah Gagal Bayar Rp26 Triliun, Kemenkop UKM: Baru Dibayar Rp 3,4 Triliun. *Tempo, Co.* <https://www.tempo.co/ekonomi/8-koperasi-bermasalah-gagal-bayar-rp26-triliun-kemenkop-ukm-baru-dibayar-rp-3-4-triliun-34173>
- Nona Dince, M., Yecci Noeng, A., & Sabon, F. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Sistem Penggajian Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Suru Pudi. *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i2.138>
- Novitaningrum Diah. (2024). Analisis & Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pada Koperasi Mahasiswa Uny. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan*, 2(3), 1–12.
- Rato, M. E. Da, Mitani, W., & Lamawitak, P. L. (2023). Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 238–250.

